
Dana Desa Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Banjar

Dewi Indah Rosalina*, M. Rusmin Nuryadin
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat
*rossalinaoc@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of village funds on reducing the number of poor people in Banjar Regency and how government policies reduce the number of poor people. This research is included in a mixed type of research, namely quantitative and qualitative research with the object of research being village funds in 19 Districts of Banjar Regency in 2018-2020 and as the independent variable (x) and the poverty level as the dependent variable (y) namely the number of poor people in 19 Districts of the Regency. Banjar 2018-2020. As an analytical material to examine more deeply, interviews were conducted with several Village Heads and the Banjar Regency PMD Service. The analytical method used in this study is simple regression of panel data with a fixed effect model. The results of this study indicate that village funds have no significant effect on reducing the number of poor people in Banjar Regency, however, based on the results of interviews, with the policies that have been implemented, village funds have an effect on reducing the number of poor people, although the effect is still very small.

Keywords: Village Fund, Poverty, Community Empowerment, Development, Policy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana desa terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengurangi jumlah penduduk miskin melalui program dana desa. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian campuran yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan objek penelitian dana desa di 19 Kecamatan Kabupaten Banjar tahun 2018-2020 dan sebagai variabel bebas (x) dan tingkat kemiskinan sebagai variabel terikat (y) yaitu jumlah penduduk miskin di 19 Kecamatan Kabupaten Banjar Tahun 2018-2020. Sebagai bahan analisis untuk mengkaji lebih dalam dilakukan wawancara dengan beberapa Kepala Desa dan Dinas PMD Kabupaten Banjar. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana data panel dengan model fixed effect. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar namun, berdasarkan hasil wawancara, dengan kebijakan yang sudah diterapkan saat ini dana desa berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin walaupun pengaruhnya masih sangat kecil.

Kata kunci: Dana Desa, Pemberdayaan masyarakat, Pembangunan, Kebijakan

PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir perekonomian di Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif tetapi, elastisitasnya terhadap tingkat kemiskinan terus menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat. Kemiskinan adalah suatu masalah sosial yang bersifat global yang dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia ini, karena tidak

ada satupun negara di dunia ini yang sudah terbebas dari kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah kemanusiaan yang akan memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Pada maret tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan mencapai 192,48 jiwa dengan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan sebanyak 70,52 jiwa dan jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan sebanyak 121,97 jiwa. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, penduduk miskin di Kalimantan Selatan lebih banyak berada di daerah perdesaan dibandingkan di daerah perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan di perdesaan masih menjadi masalah besar yang harus dihadapi pemerintah. Tetapi pada dasarnya penyebab kemiskinan di suatu daerah berbeda-beda. Kompleksitas dan perbedaan masalah kemiskinan yang dihadapi ini tergantung pada kondisi utama yang dihadapi masing-masing daerah, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan selatan, tetapi juga oleh pemerintah kota/desa.

Tabel 1
Persentase Penduduk Miskin dan Dana Desa Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2016

No	Kabupaten	Persentase Penduduk Miskin dan Dana Desa					
		2014		2015		2016	
		Po	DD	Po	DD	Po	DD
1	TANAH LAUT	4.38	7.21	4.58	36.7	4.65	80.3
2	KOTABARU	4.76	11	4.62	53.6	4.56	120
3	BANJAR	2.87	15.4	3.26	73.3	3.1	164
4	BARITO KUALA	5.19	10.8	5.37	52	5.22	117
5	TAPIN	3.63	6.99	3.88	34	3.7	76.3
6	HULU SUNGAI SELATAN	6.77	7.99	6.45	38.9	6.29	87.4
7	HULU SUNGAI TENGAH	5.65	8.93	5.81	43.2	6.18	96.9
8	HULU SUNGAI UTARA	7	11.9	7.07	56.1	6.76	127
9	TABALONG	6.21	6.77	6.59	33.6	6.35	75.4
10	TANAH BUMBU	5.21	8.04	5.55	36.7	5.27	89
11	BALANGAN	6.29	8.54	5.87	41.1	5.67	92.1
12	KOTA BANJARMASIN	4.27	3.71	4.44	0	4.22	0
13	KOTA BANJAR BARU	4.35	2.3	4.9	0	4.62	0
14	KALIMANTAN SELATAN	4.81		4.72		4.52	

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Pada Tahun 2014 sampai tahun 2016 terjadi kenaikan dana desa pada setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Kabupaten yang menerima kucuran dana desa

paling besar adalah kabupaten Banjar, kenaikan yang cukup signifikan sebesar 91,07 miliar rupiah dari tahun sebelumnya pada tahun 2015 yaitu sebesar 73,26 miliar rupiah menjadi 164,33 miliar rupiah pada tahun 2016. Namun, persentase penduduk miskin di Kabupaten Banjar justru mengalami kenaikan yaitu meningkat dari 2,87% pada tahun 2014 menjadi 3,26% pada tahun 2015, kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2016 yaitu menjadi 3,1%.

Dari tabel 1 terlihat bahwa tren kemiskinan di Kalimantan Selatan selama periode tahun 2014-2016 cukup berfluktuasi. Tingkat kemiskinan terendah terjadi di Kabupaten Banjar. Jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan di Kalimantan Selatan sangat jauh di bawah persentase kemiskinan Kalimantan Selatan yang mencapai angka 5,01% pada tahun 2015. Persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Banjar sempat mengalami kenaikan di tahun 2015 dan menurun kembali pada tahun 2016. Pada tabel 1 memperlihatkan bahwa pada tahun 2015 dan 2016 Kabupaten Banjar mendapat kenaikan dana desa yang sangat besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan mendapatkan dana desa tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dana ini diharapkan agar dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa, namun, kenaikan dana desa yang diterima Kabupaten Banjar pada tahun 2015 masih dinilai kurang efektif, karena persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Banjar pada tahun 2015 justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 3,26%, naik 0,39% dari tahun 2014. Pada tahun 2016 dana desa yang diterima Kabupaten Banjar kembali meningkat yaitu sebesar 164,33 miliar rupiah, meningkat 124% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini akhirnya mampu menurunkan persentase kemiskinan pada tahun 2016 menjadi 3,10%, turun 0,16% dari tahun 2015.

Melihat dana desa yang terus meningkat diiringi dengan penurunan persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Banjar, maka diindikasikan bahwa dana desa berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar di Provinsi Kalimantan Selatan. Inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang “DANA DESA DAN TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJAR”

KAJIAN PUSTAKA

Dana Desa

Dana desa adalah dana yang dianggarkan pemerintah pada setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut dikucurkan kepada setiap

desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Penggunaan dana desa adalah sebagai strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakatnya serta mengentaskan kemiskinan di perdesaan.

Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan infrastruktur sangat penting karena infrastruktur memegang peranan sebagai roda penggerak dalam pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur adalah suatu sistem dan di dalam sistem infrastruktur ada bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Pembangunan infrastruktur dimulai dari tingkat paling rendah yaitu pada pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan desa merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan nasional karena pedesaan merupakan bagian terbesar wilayah nasional.

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang ada di dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut ditujukan guna meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran mereka, serta mengembangkan potensinya. Penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa harus bisa meningkatkan kualitas proses perencanaan desa, mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya, pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha maupun infrastruktur.

Kemiskinan

Pengertian kemiskinan menurut BPS adalah suatu kondisi pemenuhan kebutuhan dasar yang ada di bawah standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non makanan yakni berada dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan ukuran atau suatu indikator kesejahteraan masyarakat yang menunjukkan kemampuan daya beli yang sama dari tahun ke tahun. Standar ini tidak bisa berubah walaupun tingkat kemakmuran masyarakat berubah. Oleh karena itu, kemiskinan absolut ini paling sesuai untuk digunakan dalam pemantauan program penanggulangan kemiskinan antar-waktu.

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah merupakan serangkaian perlakuan yang ditentukan dan dibuat oleh pemerintah yang memiliki pengaruh penting terhadap orang banyak. Implikasi dari definisi ini adalah kebijakan pemerintahan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai dan pilihan pemerintah dan berdampak terhadap banyak orang. Jadi, jika tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dampaknya hanya dirasakan seorang atau sebagian orang saja, maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah.

Hubungan Dana Desa dengan Tingkat Kemiskinan

Program dana desa memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa khususnya penduduk miskin dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan sarana dan prasarana desa, pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, yang secara keseluruhan melibatkan penduduk desa itu sendiri, baik penduduk miskin maupun bukan penduduk miskin. Dengan melaksanakan program-program pembangunan desa dan pemberdayaan desa diharapkan sarana prasarana desa terpenuhi, kebutuhan dasar terpenuhi, potensi ekonomi lokal dapat dikembangkan, serta sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan yang kemudian akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka pendapatan itu akan berada diatas garis kemiskinan sehingga akan menurunkan penduduk miskin.

METODE

Penelitian ini dilakukan di 19 kecamatan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018-2020 dengan melihat pengaruh dana desa terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Jenis penelitian ini merupakan penelitian campuran yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif, sehingga menggunakan data sekunder dan data primer.

Definisi Operasional Variabel

Dana Desa

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dana desa. Dana desa adalah dana yang dianggarkan pemerintah pada setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut dikucurkan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa melalui APBD kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, serta pelaksanaan program dana desa yaitu pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini dana desa yang dimaksud adalah dana desa di 19 Kecamatan Kabupaten Banjar tahun 2018-2020 yang diukur dengan satuan Rupiah (Rp) per tahun.

Kemiskinan

Menurut BPS penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan yaitu data penduduk miskin perkecamatan di 19 Kecamatan Kabupaten Banjar tahun 2018-2020, ukurannya adalah jumlah penduduk miskin dalam jiwa pertahun.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara.

- 1) Dalam penelitian ini teknik wawancara dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung pada Kepala Desa Malintang Baru, Kepala Desa Manarap Baru, dan Kepala Keuangan Aset Desa Dinas PMD Kabupaten Banjar.
- 2) Teknik dokumentasi dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder. Data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar dan Dinas Sosial Kabupaten Banjar.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi mengenai variabel bebas yaitu dana desa dan variabel terikat yaitu tingkat kemiskinan yang dilihat dari nilai mean (nilai rata-rata), maximum (nilai maksimum), minimum (nilai minimum), dan standar deviasi.

Model Regresi Sederhana Data Panel

Penelitian kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan regresi sederhana data panel yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 I_{it} + u_{it}$$

Model tersebut diterjemahkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$M_{it} = \beta_0 + \beta_1 DD_{it} + u_{it}$$

Mit = Kemiskinan (jiwa/tahun)

β_0 = Koefisien Intersep

β_1 , = Koefisien Regresi

DD = Dana Desa (Rupiah/tahun)

u = Error

I = 1, 2, 3, ..., 19 (data *cross-section* 19 kecamatan di Kabupaten Banjar)

t = 1, 2, 3 (data *time series*, tahun 2018-2020).

HASIL DAN ANALISIS

Deskripsi Statistik Variabel Penelitian

Berdasarkan tabel 2, dari 57 kecamatan yang menjadi objek penelitian, didapatkan nilai rata-rata (mean) untuk variabel tingkat kemiskinan (y) adalah sebesar 7126.035 yang artinya rata-rata jumlah penduduk miskin di 19 Kecamatan Kabupaten Banjar selama 3 tahun sebesar 7.126 jiwa. Nilai minimum variabel tingkat kemiskinan bernilai 574 yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin terendah sebesar 574 jiwa. Jumlah penduduk miskin terendah ini terjadi di Kecamatan Telaga Bauntung pada tahun 2018. Sedangkan Nilai maksimum dari variabel tingkat kemiskinan bernilai 17453.00, yang artinya jumlah penduduk miskin tertinggi dari 19 kecamatan di Kabupaten Banjar selama 3 tahun yaitu sebesar 17.453 jiwa. Hal ini terjadi pada Kecamatan Aluh-aluh pada tahun 2019. Nilai standar deviasi tingkat kemiskinan sebesar 4444.519 (dibawah rata-rata) yang artinya variabel tingkat kemiskinan memiliki variasi data yang rendah.

Tabel 2
Analisis Deskripsi Statistik Variabel

	Tingkat Kemiskinan (Y)	Dana Desa (X)
Mean	7126.035	10.700.000.000
Maximum	17453.00	19.400.000.000
Minimum	574.0000	2.710.000.000
Std. Dev.	4444.519	4.620.000.000
Observations	57	57

Data diolah dengan evIEWS 10

Variabel dana desa (x) memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 10.700.000.000, artinya jumlah dana desa yang dikucurkan pemerintah di Kabupaten Banjar selama tahun

2018 sampai tahun 2020 rata-ratanya sebesar Rp10.700.000.000 miliar. Sedangkan nilai maksimum dari variabel dana desa sebesar 19.400.000.000, artinya dana desa tertinggi yang pernah dikucurkan pemerintah adalah sebesar Rp19.400.000.000 miliar. Nilai minimum untuk variabel dana desa yaitu sebesar 2.710.000.000, artinya dana desa terkecil yang dikucurkan pemerintah yaitu Rp2.710.000.000 miliar. Nilai standar deviasi dari variabel bebas ini sebesar 4.620.000.000 (dibawah rata-rata), hal ini menunjukkan bahwa variabel dana desa memiliki variasi data yang rendah.

Analisis Regresi Sederhana Data Panel

Dibawah ini terdapat tabel hasil analisis regresi sederhana data panel menggunakan Fixed Effect Model dengan jumlah observasi sebanyak 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar selama periode 2018-2020 (3 tahun). Berdasarkan hasil regresi pada tabel 3 maka dapat dirumuskan model data panel sebagai berikut:

$$M_{it} = 6288.979 + 0,000000078DD_{it}$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta (c) sebesar 6288.979, artinya apabila Dana Desa sebesar 0, maka pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan sebesar 6288.979. Variabel Dana Desa memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 0,000000078, hal ini menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, jika terjadi kenaikan dana desa 1 miliar rupiah maka tingkat kemiskinan akan meningkat pula sebesar 0,000000078%. Nilai Probabilitas F-statistik sebesar 0,000000. Nilai ini lebih kecil dari α 5% (0,05) yang artinya dana desa berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, artinya model ini signifikan dan layak digunakan untuk penelitian ini.

Tabel 3
Hasil Uji Regresi Sederhana Data Panel (Fixed Effect Model)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6288.979	869.7332	7.230929	0.0000
Dana Desa	0,000000078	0,0000000809	0.964789	0.3409
R-squared	0.992953	Mean dependent var		7126.035
Adjusted R-squared	0.989334	S.D. dependent var		4444.519
S.E. of regression	459.0097	Akaike info criterion		15.36564
Sum squared resid	7795527	Schwarz criterion		16.08250
Log likelihood	-417.9208	Hannan-Quinn criter.		15.64424
F-statistic	274.3904	Durbin-Watson stat		2.675467
Prob(F-statistic)	0.000000			

Data Hasil Olahan Eviews 10

Uji Statistik

Uji R²

Nilai Koefisien determinasi (R²) yang diperoleh dari hasil estimasi adalah sebesar 0.989334. Hal ini berarti bahwa variabel tingkat kemiskinan dapat dijelaskan/dipengaruhi oleh variabel dana desa sebesar 98%, sedangkan sisanya 2% (100% - 2%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Dapat kita katakan bahwa Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Banjar tahun 2018-2020 dipengaruhi oleh Dana Desa, dengan ditunjukkan hasil regresi pada Adjusted R-squared sebesar 0.989334 atau 98%, sedangkan 2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Uji R

Perhitungan nilai koefisien korelasi (R) adalah dengan mengakarakan nilai dari koefisien determinasi (R²), maka dapat dihitung nilai koefisien korelasi sebesar $\sqrt{0.989334} = 0.994652703208$. Nilai koefisien korelasi sebesar 0.994652703208, artinya pengaruh variabel dana desa dan variabel tingkat kemiskinan dalam penelitian memiliki pengaruh yang sangat kuat yaitu sebesar 99,46%.

Uji T

Berdasarkan tabel 5.12 di atas, dapat dilihat bahwa Variabel dana desa mempunyai nilai probabilitas sebesar 0.3409. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai probabilitasnya. Hasil penelitian diperoleh bahwa nilai probabilitas lebih besar dari α 5% (0.3409 > 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa variabel dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Banjar.

Pembahasan Hasil Penelitian

Kebijakan Pemerintah Terhadap Kemiskinan Melalui Dana Desa

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu dilakukan wawancara dengan tiga narasumber yaitu Bapak Syahril selaku Kepala Desa Desa Malintang Baru Kecamatan Gambut sebagai narasumber 1, Bapak Arif selaku Kepala Desa Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar sebagai narasumber 2 dan Bapak Azmi selaku Kepala Bidang Keuangan Aset Desa Dinas PMD Kabupaten Banjar sebagai narasumber 3.

1. Kebijakan Program Dana Desa Di Desa Malintang Baru

Kebijakan program dana desa yang dilaksanakan di Desa Malintang Baru mengacu pada RPJMD dan RPJMN. Bapak Syahril mengatakan bahwa semua program dana desa yang dilaksanakan dasarnya dari pemerintah kemudian desa mengembangkan lagi kebijakan tersebut menjadi program-program yang sesuai dengan kebutuhan desa. Hal ini didasarkan pada pernyataan “Kebijakan untuk mengurangi kemiskinan melalui program dana desa sudah banyak yang diterapkan karena banyak program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan untuk membantu penduduk miskin dan mengentaskan kemiskinan. Program program yang dilaksanakan mengacu pada RPJMD dan RPJMN, setelah itu baru dimusyawarahkan lagi program mana yang akan dijalankan. Meskipun dana desa dikelola dan dianggarkan oleh pemerintahan desa sendiri namun pemerintah juga dapat mengeluarkan kebijakan terkait program dana desa seperti program BLT (Bantuan Langsung Tunai). Pemerintah mewajibkan sebagian dana desa dialokasikan untuk program BLT. Kebijakan ini baru saja dikeluarkan pemerintah saat pandemic covid-19. Kemudian dari desa sendiri ada program bedah rumah untuk rumah yang tidak layak huni dan program jambanisasi yaitu kami membangun wc untuk penduduk yang tidak mempunyai wc. Kemudian ada program pembangunan infrastruktur yang sistemnya padat karya yaitu memanfaatkan tenaga lokal sehingga menyediakan lapangan kerja khususnya untuk penduduk miskin, program ini dapat membantu keberlangsungan hidup bagi penduduk miskin. Ada juga program pelatihan pemberdayaan masyarakat yang tidak terealisasi karena kendala anggaran yaitu pelatihan budi daya ikan yang harusnya dilaksanakan awal tahun ini saat air lagi pasang tetapi karena anggaran turun ketika musimnya sudah lewat sehingga program ini tidak dapat terealisasi.”

Narasumber 1 kembali memberi penegasan tentang program dana desa dalam penurunan jumlah penduduk miskin, berdasarkan pernyataan “Intinya dana desa sudah mencukupi saja sesuai dengan pembangunan dan pemberdayaan di desa ini, tetapi tinggal kesadaran masyarakatnya lagi apakah ingin maju atau tidak, karena banyak program bantuan dana dari pemerintah pusat maupun dana desa sehingga setiap bertemu yang menjadi pertanyaan mereka kepada saya hanyalah kapan mendapatkan bantuan dana lagi. Masyarakat sudah terbiasa mendapatkan bantuan dana sehingga menjadi manja dan tidak mau mencari pekerjaan dan hanya mengharapkan dana bantuan terus menerus. Bantuan dana yang salah sasaran juga menjadi penyebab tidak berkurangnya penduduk miskin, sebagai contoh program BST dari kementerian sosial. Program ini

masih mengacu pada data lama yang ada di kementerian sosial, sehingga warga yang kini sudah sejahtera dan tidak termasuk kategori miskin masih mendapat bantuan dana tersebut.”

2. Kebijakan Program Dana Desa Di Desa Manarap Baru

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Narasumber 2 yaitu Bapak Muhammad Arif selaku Kepala Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar, beliau berkata “Sedikit banyak dana desa berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan di Desa Manarap Baru, karena dari kementerian desa sekarang ada kebijakan program untuk pembangunan infrastruktur menggunakan sistem padat karya tunai yang pekerjaannya itu diutamakan warga miskin kemudian baru warga biasa, jadi yang diutamakan padat karya tunai itu memperbanyak warga bekerja membangun desanya sehingga berpengaruh terhadap penanggulangan karena membuka lapangan pekerjaan. Saat ini juga ada program BLT, kebijakan ini baru saja diterapkan pemerintah semenjak adanya pandemi covid-19. Bantuan ini menjangkit warga-warga miskin yang kehilangan pekerjaannya di masa pandemi covid-19 atau yang memang tidak bekerja dan tidak menerima bantuan lain dari kementerian seperti PKH, BST, bantuan UMKM, dan bantuan prakerja. Pelatihan pelatihan pemberdayaan masyarakat juga banyak yang sudah dijalankan seperti pelatihan menjahit, pelatihan membuat telur asin, dan pelatihan otomotif (bengkel). Sedangkan penggunaan dana desa untuk mengentaskan kemiskinan dari segi program pembangunan yang menggunakan sistem padat karya tunai juga banyak yang sudah terealisasi yaitu pembangunan TK/Paud, pembangunan jembatan, pembangunan jalan desa, pembangunan perpustakaan, dan pembangunan balai serba guna”

Terkait hal-hal yang membuat program dana desa tidak berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, Narasumber 2 juga berpendapat bahwa jika suatu desa ingin maju dan jumlah penduduk miskin di desa ini berkurang maka masih banyak yang perlu ditingkatkan lagi seperti kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat, kemampuan atau softskill masyarakat yang masih kurang, dan kesadaran masyarakat untuk maju, dengan pernyataan “Setiap desa pasti punya kendala/masalahnya masing-masing, kalau untuk desa manarap baru ini menurut saya masih kurangnya SDM dan kesadaran masyarakat. Namanya pembangunan desa kan skala prioritasnya sosial dan kendalanya kadang di pekerjaannya. Di dalam ketentuan pembangunan, desa memerlukan pekerja, tukang, dan mandor. Sementara upah untuk

pekerja tersebut berbeda-beda sesuai dengan tugasnya masing-masing, perbedaan upah tersebut menjadi kendalanya, masyarakat tidak terima diberi upah yang berbeda-beda sesuai ketentuan yang sudah dianggarkan. Kemampuan bertukang juga sangat diperlukan bagi penduduk miskin, karena pembangunan desa menggunakan sistem padat karya tunai sehingga penduduk miskin dapat bekerja membangun desanya, tetapi yang menjadi kendala adalah masih kurangnya kemampuan masyarakat kami dalam bertukang sehingga untuk pembangunan jalan hanya dikerjakan sampai pengerasan saja tidak sampai pengaspalan sehingga harus melibatkan pihak ketiga. Berbeda dengan di pulau jawa yang masyarakatnya mempunyai skill bertukang yang tinggi sehingga yang membangun infrastrukturnya masyarakatnya semua jarang menggunakan pihak ketiga. Hal ini sangat disayangkan mengingat persentase dana desa untuk pembangunan infrastruktur di desa kami 70% dan untuk pemberdayaan 30%. Pada tahun 2018 sempat ada BUMDes tetapi hanya berjalan 3 bulan. Kami memberi modal kepada masyarakat yang ingin membuka usaha tetapi karena masih kurangnya minat dan skill sehingga usaha yang dijalankan tidak menghasilkan. Masyarakat berpikir akan digaji jika menjalankan usaha, padahal kami hanya memberikan modal dan masyarakat yang menjalankannya, jika usaha itu untung maka masyarakat juga yang menikmatinya, tetapi karena usaha yang dikelola tidak menguntungkan sehingga masyarakat berpikir lebih baik mencari pekerjaan di lain saja daripada menjalankan usaha.”

3. Kebijakan Dana Desa Dinas PMD Kab. Banjar Terhadap Kemiskinan

Narasumber 3 Bapak Azmi selaku Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kabupaten Banjar menyatakan bahwa “Dinas PMD hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi dan membina desa serta membuat regulasi dan kebijakan mengenai teknis pencairan dana desa, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta pemberdayaan masyarakat” beliau juga berpendapat bahwa secara umum dana desa berpengaruh terhadap kemiskinan tetapi masih ada hal-hal yang menjadi kendala, dengan pernyataan:

“Sebelum adanya covid-19 angka kemiskinan memang menurun, tetapi setelah covid-19 kami belum tau karena belum menerima data jumlah penduduk miskin. Kebijakan dana desa dari pusat itu kan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur, dari kementerian desa pun kebijakan setiap tahun berbeda-beda prioritas penggunaan dana desa, jadi kalau dilihat dari penurunan angka kemiskinan ada pengaruhnya sedikit banyak. Tugas Dinas PMD hanya sebagai pembinaan dan fasilitator tidak bisa ikut campur terhadap anggaran dana desa yang

dialokasikan desa untuk program-program dana desa. Kami hanya bisa membuat regulasi untuk pembagian dana desa, membina, monitoring ke desa, melayani desa yang ingin berkonsultasi mengenai peraturan-peraturan, kadang kendalanya ada sebagian desa yang mengalokasikan dana desa tidak sesuai dengan prioritas di aturan, sehingga harus kami berikan arahan. Kondisi biografis juga menjadi hambatan bagi kita untuk monitoring ke desa-desa mengingat di Kabupaten Banjar ini ada 290 desa yang tersebar luas dan jaraknya jauh-jauh, seperti paramasan kita harus melewati rantau dan kandang baru bisa sampai kesana, begitu juga dengan Aluh-aluh harus memakai kelotok dulu baru bisa sampai ke desanya. Begitupun sebaliknya, kendala yang dirasakan desa yang jauh dari Dinas PMD salah satunya saat pengajuan pencairan dana desa, berkas yang tertinggal atau tidak lengkap akan memperlambat pencairan dana desa dikarenakan jarak yang ditempuh jauh dari desa tersebut ke Dinas PMD. Kalau untuk komunikasi alhamdulillah semenjak tahun ini di sebagian sudah mulai lancar karena di sudah ada jaringan, sehingga komunikasi bisa melalui whatsapp, tetapi untuk monitoring tetap menjadi kendala karena harus datang langsung ke desa tersebut. Sumber daya manusia yang rendah juga jadi kendala untuk desa-desa di daerah perbatasan, karena jaman sekarang melek teknologi adalah hal yang penting untuk memudahkan urusan pekerjaan, sedangkan kualifikasi sebagai pembakal desa adalah lulusan smp sehingga banyak pembakal-pembakal yang kesusahan saat berurusan dengan berkas-berkas yang harus dikirim melalui email atau whatsapp.”

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin berpengaruh walaupun masih sangat minim atau belum maksimal karena masih banyak kendala yang dihadapi dan kendala itu berasal dari masyarakatnya sendiri dan masih banyak desa yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur sehingga persentase penggunaan dana desa yaitu 60%-70% dialokasikan untuk pembangunan dan 30%-40% untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga kurangnya pemberdayaan masyarakat terhadap penduduk miskin.

Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi data panel diatas dengan menggunakan *model fixed effect* menunjukkan bahwa variabel bebas yakni dana desa berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Banjar yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas variabel dana desa lebih besar dari 5% ($0.3409 > 0,05$). Hasil Uji T juga

menunjukkan bahwa dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, hal ini disebabkan oleh waktu penelitian yang pendek yaitu hanya 3 tahun (2018-2020) dan dana desa saat ini 60-70% dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, karena masih banyak desa-desa tertinggal dari segi pembangunan sehingga memprioritaskan pembangunan infrastruktur daripada memberdayakan masyarakat. Pembangunan infrastruktur sendiri merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya baru dirasakan beberapa tahun kemudian seperti pembangunan jalan desa, pembangunan jembatan, pembangunan irigasi sawah, pengembangan jaringan internet dan telekomunikasi, program-program tersebut dapat memudahkan aksesibilitas masyarakat sehingga perekonomian desa dapat berkembang. Berdasarkan wawancara dengan Narasumber 1, beliau mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur desa tidak bisa langsung selesai dalam 1 tahun, karena dana desa juga diprioritaskan untuk pemberdayaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga proses pembangunan membutuhkan waktu yang lama ini membuat program pembangunan infrastruktur memiliki pengaruh yang kecil terhadap penurunan jumlah penduduk miskin jika dilihat dalam kurun waktu 3 tahun saja. Terlihat pada tabel 1 meskipun dari tahun ke tahun dana desa terus meningkat, namun dari 19 kecamatan hanya 10 kecamatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk miskin, 9 kecamatan lainnya mengalami kenaikan penduduk miskin.

Implikasi Hasil Penelitian

Dana desa diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan diprioritaskan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat serta pembangunan desa yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa tidak berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin tetapi berdasarkan hasil wawancara langsung dana desa berpengaruh terhadap kemiskinan dan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk miskin melalui program-program swakelola yang memberdayakan masyarakat lokal dan bantuan berupa uang dari dana desa yaitu BLT (Bantuan Langsung Tunai). Pemberdayaan melalui program-program pelatihan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perdesaan karena sumber daya manusianya lah yang menjadi inti dari penggunaan dana desa itu sendiri. Jika sumber daya manusianya rendah maka program swakelola seperti padat karya tunai dan BUMDes akan terhambat karena minimnya kemampuan masyarakat

dalam bertukang dan mengelola usaha. Kerjasama antar pemerintah desa dan masyarakat juga merupakan hal yang penting, karena program-program pengentasan kemiskinan tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin jika masyarakatnya sendiri tidak mau terlibat dalam program-program yang dijalankan pemerintah desa. Hal ini mengandung implikasi agar pemerintah desa lebih banyak mengadakan pelatihan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan program swakelola sehingga banyak sumber daya manusia yang terserap dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan semestinya. BUMDes dapat menggerakkan perokoniman masyarakat, mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dari hasil wawancara dengan kepala desa manarap baru beliau berkata bahwa masih kurangnya minat masyarakat dalam menjalankan BUMDes. Hal ini mengandung implikasi agar pemerintah desa dan pemerintah daerah yaitu perangkat desa dan Dinas PMD mengadakan pelatihan atau bimbingan mengenai pengelolaan usaha yang sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing desa.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah ketersediaan data jumlah penduduk miskin dari Dinas Sosial Kabupaten Banjar dan data dana desa dari Dinas PMD Kabupaten Banjar. Data dana desa yang tersedia adalah dana desa per kecamatan dari tahun 2015-2020 sedangkan data jumlah penduduk miskin per kecamatan yang tersedia hanya dari tahun 2018-2021 sehingga peneliti hanya bisa menguji data dana desa dan jumlah penduduk miskin selama 3 tahun yaitu 2018-2020. Dan masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki dalam penyusunan skripsi maupun dalam pengolahan data.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan regresi data panel dan wawancara yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka pada bagian penutup ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Banjar. Hasil Uji T menunjukkan bahwa dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun, model ini layak untuk dipakai dalam penelitian ini karena nilai probabilitas F-Statistik lebih kecil dari 5%. *Kedua*, Kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin melalui program dana

desa berpengaruh walaupun masih sangat minim atau belum terlihat hasil yang signifikan. Pengalokasian dana desa masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dengan persentase 70% yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang manfaatnya baru akan terasa beberapa tahun kemudian. Sedangkan 30% dana desa dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga kurangnya program pemberdayaan masyarakat menghambat program dana desa yang lain (BUMDes dan program padat karya) karena masih rendahnya skill dan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk pihak-pihak terkait dalam hasil penelitian, antara lain: *pertama*, Diharapkan kepada pemerintah daerah khususnya Dinas PMD memperbanyak mengadakan program pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan, pembinaan, dan pengarahan mengenai BUMDes sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat dalam menjalankan BUMDes. Kepada pemerintah desa dapat mengadakan program pelatihan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan program dana desa yang dijalankan untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan menggali potensi ekonomi di pedesaan. *Kedua*, Bagi peneliti selanjutnya, untuk menyempurnakan penelitian ini sebaiknya menambah data dana desa yang akan diteliti dan memperpanjang waktu periode penelitian agar hasil yang didapatkan akurat dan bervariasi. Kemudian untuk data dana desa dan jumlah penduduk miskin yang akan dianalisis dapat dikonversikan, sehingga yang dianalisis adalah peningkatan dana desa dan jumlah penduduk miskin pertahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, (2017). *Kajian Ekonomi Regional PDRB Kabupaten Banjar 2012-2016*. Kabupaten Banjar.
- Badan Pusat Statistik, (2017). *Analisis Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Banjar 2012-2016*. Kabupaten Banjar.
- Badan Pusat Statistik, (2020). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar 2019/2020*. Kabupaten Banjar.
- Badan Pusat Statistik, (2020). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar 2019/2020*. Kabupaten Banjar.
- Badan Pusat Statistik, (2019). *Indikator Kesejahteraan Provinsi Kalimantan Selatan 2018*. Kalimantan Selatan.

- Endang Juliana. (2017). *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan*. [skripsi]. Medan.
- Gujarati, D., & Porter, d. D. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hikmawati, Fenti. (2017). *Metodelogi Penelitian*. Depok. PT RajaGrafindo Persada.
- Mahfudz. (2009). Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang *Dana Desa yang Bersumber dari APBN*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang *Sumber-sumber Pendapatan Desa*.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 Tentang *Prioritas Pelaksanaan Program Dana Desa*.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 Tentang *Prioritas Pelaksanaan Program Dana Desa*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang *Pemekaran Kecamatan Simpang Empat dan Pembentukan Kecamatan Cintapuri Darussalam*.
- Roy, Debby dan Een. (2018). Efektivitas Dana Desa (DD) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*.
- Sudjana, Nana dan Ibrahim. (1989). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung. Sinar Baru.
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Umar, H. (2007). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan tesis Bisnis*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Yulfan, Rina dan Fuad. (2019). Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro. *Jurnal Magisma*.